

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kajian yang sungguh-sungguh terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai dasar untuk maju ke tahap penelitian selanjutnya. Kajian pustaka juga didefinisikan sebagai daftar referensi untuk semua jenis referensi, termasuk buku, jurnal, artikel, PTK, disertasi, dan studi akademis lainnya yang dikutip saat membuat aplikasi. Artikel ini menjelaskan penelitian teoritis, penelitian terkait, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian (Toharudin:2021).

2.1.1 Perencanaan

2.1.1.1 Pengertian Perencanaan

Menurut Bambang Spriadi (2017:3) definisi Perencanaan adalah sebagai berikut :

“Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terdiri dari 4 fungsi utama. Manajemen perencanaan (fungsi perencanaan), Pengorganisasian (fungsi pengorganisasian), Pengarahan (pengarahan) dan pengendalian (pengendalian), sehingga perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak untuk menerapkan manajemen yang baik, dan Untuk membuat rencana yang baik harus hati-hati memikirkan terlebih dahulu tindakan yang akan dilakukan nantinya. Ini berarti bisa melakukan perencanaan yang baik sehingga kita bisa melihat jauh ke depan”.

Menurut Kusno Hadiutomo (2021:35-36) definisi Perencanaan adalah sebagai berikut :

“Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting. Di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi atau perusahaan, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi atau perusahaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan

suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa perencanaan artinya mampu membuat perencanaan yang baik sehingga dapat melihat jauh kedepan, ini mencakup kegiatan yang bertujuan untuk menentukan tujuan organisasi atau perusahaan, menciptakan strategi dan mengembangkan rencana kerja organisasi atau perusahaan.

2.1.1.2 Indikator Perencanaan

Menurut Kusno (2021:34) indikator Perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan.
- 3) Senantiasa dihubungkan antara berbagai permasalahan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki.
- 4) Kebijakan yang terbaik untuk merealisasikan tujuan.
- 5) Perencanaan mengandung program, kegiatan dan usaha-usaha yang nyata

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2021:56-57) indikator Perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menilai bahwa perencanaan digunakan sebagai wahana untuk memonitoring dan persiapan yang matang dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kinerja instansi.
- 2) Memberikan rekomendasi perbaikan atas perencanaan.

Dari kedua indikator tersebut penulis menarik kesimpulannya adalah Tujuan yang ingin dicapai, Jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan, Senantiasa dihubungkan antara berbagai permasalahan dengan berbagai sumber

daya yang dimiliki, Avariabelif kebijakan yang terbaik untuk merealisasikan tujuan, Perencanaan mengandung program, kegiatan dan usaha-usaha yang nyata

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Yosefina, dkk (2022:26) definisi Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut :

“Panggaran berbasis kinerja (performance budgeting) merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Definisi tersebut mengandung konsekmensi bahwa setiap alokasi dana harus dapat diukur capaian output/outcome (keluaran/hasil) yang hendak ingin dicapai dari input (masukan) yang ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Jan Hoesada (2022:589) definisi Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut :

“Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu elemen reformasi keuangan yang paling mendasar di Republik Indonesia. Anggaran berbasis kinerja dimulai dengan penetapan visi entitas, sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan), kinerja jangka pendek (tahunan), penetapan keluaran atau target hasil (tahunan) yang dirinci menjadi kinerja tahunan kegiatan utama sesuai tupoksi, proyek dan program utama entitas tersebut”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja. Dengan penetapan visi entitas yang dirinci menjadi kinerja tahunan.

2.1.2.2 Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia/ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008:10-11) indikator Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan tertukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan tertukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan (support goal).

2) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realistis. Tujuan yang baik bercirikan, antara lain memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, menggambarkan arah organisasi dan secara jelas program-programnya, menantang namun realistis, mengidentifikasi obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai.

3) Visi dan Misi yang hendak dicapai

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang. Sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.

4) Program

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk akal dan dapat dicapai.

5) Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.

Menurut Abdul Halim (2012:173) indikator Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- 2) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.
- 3) Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi.

Dari kedua indikator tersebut penulis menarik kesimpulannya dengan indikator visi dan misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Menurut Rusdiana (2021:41) definisi Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara variabel. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”.

Menurut Riana Mayasari (2021:21) definisi Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas kinerja merupakan jenis tanggung jawab pemerintah untuk program dan kegiatan yang telah diselesaikan. Proses untuk mencapai tata kelola yang efektif, perlu akuntabilitas kinerja diterapkan. Akuntabilitas kinerja yang baik tidak dapat dipisahkan dari ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pencapaian variabel kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan suatu organisasi. Ukuran kinerja yang baik dapat digunakan untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

3.6.2.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mohamad Thahir, dkk (2021:58) Akuntabilitas kinerja mencakup beberapa indikator yaitu:

- 1) Menyajikan informasi capaian kinerja tahunan
- 2) Kepada warga negara menyediakan informasi tentang prestasi pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2009:122) indikator Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

1) Efisiensi

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

2) Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output.

3) Outcome

Dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.

Dari kedua indikator tersebut penulis menarik kesimpulannya dengan indikator yaitu efisiensi, efektivitas dan outcome.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perencanaan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut beberapa pendapat para ahli yang menyatakan pengaruh antara Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Caroline (2019:154) yang menyatakan hubungan antara Perencanaan dan akuntabilitas kinerja bahwa Akuntabilitas kinerja juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Demikian pula dengan pernyataan oleh Nursadi (2019:145) menyatakan bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan

sumber daya manusia aparaturnya perencanaan baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, penilaian capaian Indikator Kinerja Utama menggambarkan capaian indikator outcome.

Pernyataan atau konsep teori di dukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Winara dan Putri (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian yang dilakukan penelitian Syuliswati dan Asdani (2017) secara simultan faktor perencanaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya penelitian ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Cahya Budi (2020) hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan program dan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

2.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut beberapa pendapat para ahli yang menyatakan pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan konsep yang dinyatakan Pandapotan Ritonga (2021:120-121) yang mengatakan hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja mendukung tujuan dan kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan meningkatkan proses pembuatan kebijakan.

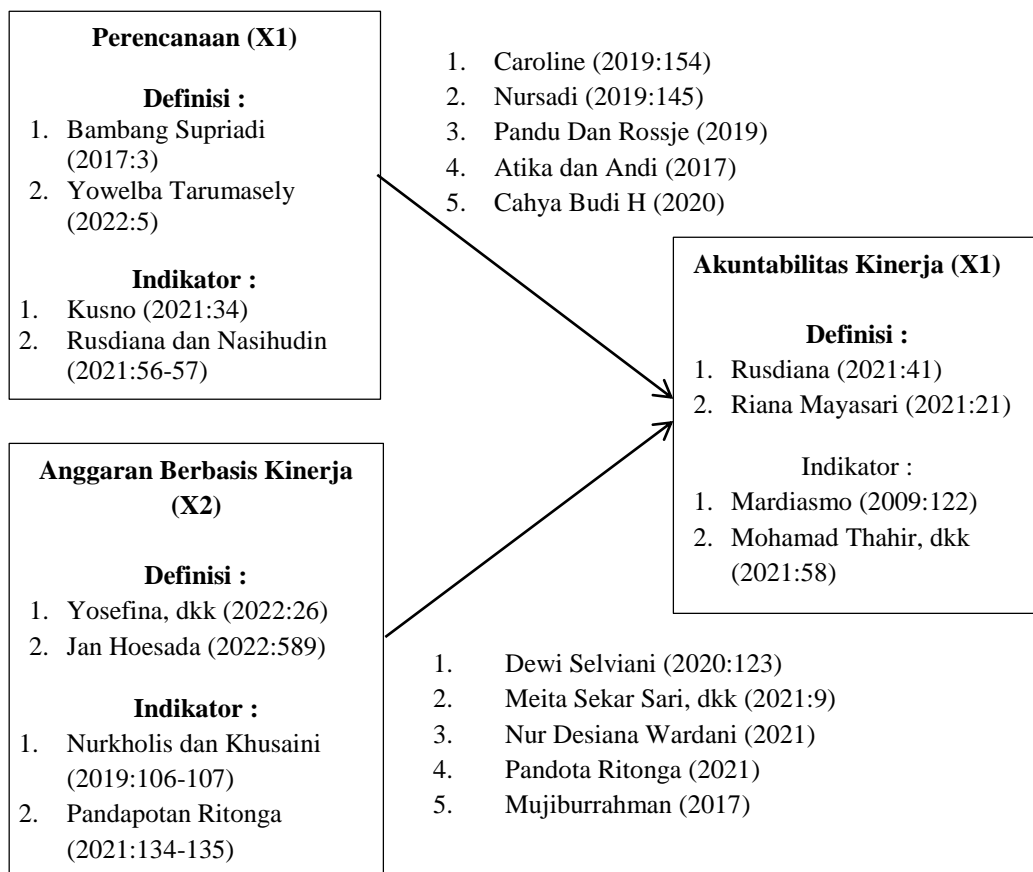
Akuntabilitas kinerja memperkenalkan sistem pembuatan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan membuat rencana kerja dan anggaran dapat memenuhi kebutuhan anggaran berbasis kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja. Demikian pula dengan pernyataan oleh Mujiburrahman (2017:42) menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan terealisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) sesuai dengan Inpres 7 tahun 1999. Dengan keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai kinerja laporan keuangan tersebut, DPRD dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan pengawasan lain yang terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dukungan staf tenaga ahli dapat dioptimalkan untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPI tersebut.

Pernyataan atau konsep teori di dukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Silvia (2020) menyatakan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dengan menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 63,4% sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabeln lain. Kemudian peneliti yang dilakukan oleh Suhendar, Sari dan Nofitri (2021) sehingga dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya penelitian ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Silvia (2021) berdasarkan hasil telah dipresentasikan anggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LPMP Provinsi Lampung.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berikut paradigma dari penelitian ini :



Gambar 2 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hipotesis adalah merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara yang mungkin benar tetapi mungkin juga salah. Hipotesis sebenarnya suatu dugaan, tidaklah hanya asal membuat dugaan tetapi dugaan yang didasarkan atas teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan Agung Edy Wibowo (2021:72).

Hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Perencanaan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

H2: Anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.